

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

Asikin, Zainal, 2001, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Hoff, Jerry, 2000, *Undang-undang Kepailitan Di Indonesia*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Ctk. Pertama, PT. Tatanusa, Jakarta.

Lebacqz, Karen, 2004, *Teori-teori Keadilan*, Nusamedia, Bandung.

Lontoh, Rudy A, (ed), 2001, *Menyelesaikan Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Surabaya.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003 *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nating, Imran, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Ctk. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta.

Rajagukguk, Erman dan Rudhi A. Lontoh (editor), 2001, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung.

Sastrawidjaja, Man S, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

Simanjutak, P.N.H, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Sjahdeni, Sutan Remy, 1999, *Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok yang Dihadapi oleh Perbankan*, Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2008, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.

Sunarmi, 2010, *Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Edisi 2*, Sofmedia, Jakarta.

Tumbuan, Fred BG dan Rudhi A. Lontoh (editor), 2001, *Pokok-pokok Undang-Undang tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh Perpu No. 1/1998, Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung.

Widjaja, Gunawan, 2009, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Ctk. Pertama, Forum Sahabat, Jakarta.

#### **B. Makalah:**

Fred B.G. Tambunan, “Menelaah Konsep dasar dan Aspek Hukum Kepailitan”, Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Proceeding Kepailitan dan Transfer Asset Secara Melawan Hukum: Pusat pengkajian Hukum, Bogor, 20-22 Juli 2004.

Kartini Muljadi, “Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan”, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 26-28 Januari 2004.

Marjan Pane. “Peranan Kurator dalam Pemberesan dan Pelelangan serta Masalah-masalah dalam Eksekusi Putusan Kepailitan”, dalam lokakarya “Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum”, Bogor, 20-22 Juli 2004.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Standar Profesi Kurator dan Pengurus diterbitkan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

#### **D. Putusan Pengadilan:**

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 07/Pailit/2009/PN-Niaga.Sby

Putusan Tingkat Kasasi No. 158 K/Pdt

### **E. Penetapan Pengadilan**

Penetapan Daftar Pembagian Harta Pailit Debitor Pailit PT. Metalindo Perwita  
yang ditetapkan Hakim Pengawas No. 07/Pailit/2009/PN-Niaga.Sby

### **F. Internet**

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d87b9cb1da/mk-pastikan-hak-  
pekerja-dalam-kepailitan--broleh--juanda-pangaribuan-](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d87b9cb1da/mk-pastikan-hak-pekerja-dalam-kepailitan--broleh--juanda-pangaribuan-)  
diakses pada tanggal 15 April 2016, Pukul 21.00

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20364/hak-eksekutorial-kreditor-  
separatis-kapan-dapat-dilaksanakan](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20364/hak-eksekutorial-kreditor-separatis-kapan-dapat-dilaksanakan)  
diakses pada tanggal 16 April pukul 13.05